

BAB III

LATAR BELAKANG MUNCULNYA KONFLIK MOH. HATTA

PADA PEMERINTAHAN 1955-1965

A. Pertentangan Ideologi Soekarno-Hatta

khalifah harus mampu melidungi seluruh umat Islam. Di suatu kesempatan lain dalam pidatonya Bung Karno mengibaratkan pemimpin merupakan pengembala. Di sini seorang kepala pemerintahan diartikan sebagai imam yang memiliki tanggung jawab atas keadaan rakyatnya.³

Bung Karno mengajarkan penertiban dan pengaturan menurut wajarnya kemudian diimplementasikan dalam UU kepartaian. Demokrasi terpimpin haruslah bisa mencapai masyarakat yang adil dan makmur sehingga tidak salah jika demokrasi terpimpin adalah demokrasi penyelenggara atau demokrasi yang perlu dihasilkan dengan bekerja dan bekerja bukan cuma berbicara. Alat demokrasi terpimpin mengenal kebebasan berpikir dan berbicara dalam batas keselamatan negara. Demokrasi berarti kemerdekaan membuat orang bebas menggunakan pikirannya tanpa campur tangan pihak lain.⁶

Demokrasi Indonesia yang dikenalkan oleh Bung Hatta artinya tidak berdasarkan kebudayaan Indonesia disini artinya kedaulatan rakyat dijunjungnya tidak sama dengan *Volskouvereiniteit individualisme*. Betul ada persamaan nama karena Bung Hatta mengambil dari Barat. Menurutny adalah suatu keharusan untuk selalu menyetujui musyawarah tetapi menolak mufakat sebab musyawarah merupakan cara-cara menolak menang sendiri, sikap diktatorial/ otoriter.⁷

⁵*Ibid.*, 80.

⁶Ibid., 80.

⁷Hartanto, *Skripsi Sejarah Pertentangan Soekarno-Hatta*, 80-81.

Dari ketiga sendi tersebut dapat disesuaikan dengan kemajuan zaman, sedangkan yang menjadi dasar kerakyatan yaitu kedaulatan rakyat, jadi konsep kedaulatan rakyat yaitu kelanjutan dari demokrasi asli Indonesia pada tingkat yang lebih tinggi. Menurut Hatta demokrasi rakyat di Indonesia hanya ada pada demokrasi dalam pemerintahan desa seperti dicontohkan zaman raja-raja yang berlaku adalah otokrasi dan feodalisme. Pendek kata daulat tuanku harus diganti dengan daulat rakyat, agar nantinya rakyat berkuasa.¹¹

Demokrasi parlementer menurut Bung Hatta mengutamakan aspek-aspek politik, karena cita-cita demokrasi politik di Barat telah maju. Definisi Parlementer di Barat merupakan hasil politik dari suatu evaluasi politik karena lapisan demi lapisan dan masyarakat memperoleh kekuatan ekonomi, mereka maju ke medan perjuangan politik serta telah mencapai kemenangan/telah mendapat perwakilan parlementer. Disini dapat disimpulkan parlementer di Barat adalah ganjaran politik untuk kekuatan ekonomi yang telah dicapai karena mereka kuat ekonominya berusaha melindungi kekuatan itu dengan alat-alat politik.¹³

Demokrasi di Indonesia mengandung unsur pembinaan dan pelaksanaan ekonomi yang besar. Sedangkan demokrasi di Barat dapat menerima banyak bentuk, selama dua hal yang pokok dipenuhi yaitu perwakilan rakyat secara jujur dan pemerintahan yang bertanggung jawab pada parlemen.

a. Sosialisme menurut Bung Karno

¹²Muhammad Hatta, *Islam Masyarakat Demokrasi dan Perdamaian* (Jakarta: Tintamas, 1957), 50-54.

[illegible]

Bung Karno mempunyai pemikiran tersendiri mengenai perpaduan antara paham Marxisme dengan pandangan hidup bangsa Indonesia pada waktu itu. Terpengaruh oleh Gurunya HOS Tjokroaminoto (1916-1920), Bung Karno memberikan batasan bahwasannya ada persamaan yang mendasar antara sosialisme dalam teori Marxis dan kehidupan masyarakat Indonesia, terutama dalam hal gotong royong dan kolektivisme.¹⁵

Dalam artikelnya yang dimuat di majalah Indonesia Moedatahun 1926 Soekarno sebenarnya telah memantapkan ideologinya untuk menyatukan tiga paham besar pada waktu itu yaitu, Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme yang kemudian menjadi fenomenal ketika Bung Karno menerapkannya dalam pemerintahan Indonesia sewaktu ia menjabat menjadi presiden. Kemudian Bung

¹⁵Ibid., 64.

Pemikiran Bung Karno ini dilandasi kesadaran akan tragedi negeri jajahan. Dan saat itu, di Indonesia sudah muncul beberapa pergerakan rakyat yang masing-masing bermuara pada tiga aliran politik yaitu Nasionalis, Islamis, dan Marxis. Dengan mempelajari dan mencari hubungan antara ketiga sifat itu, Bung Karno menegaskan bahwa sebenarnya ketiga aliran tersebut di Indonesia memiliki tujuan yang sama, karena itu, tak ada gunanya mereka berseteru satu sama lain. Bahkan, seharusnya bisa bekerja bersama-sama menjadi satu gelombang yang maha besar dan maha kuat.¹⁷

Bung Karno mengajak seluruh komponen yang ada di tanah air agar menjauhi perpecahan mengenai perbedaan aliran tersebut untuk kemudian menyatukan kaum Nasionalis, Islamis, dan Marxis agar bersatu dalam perjuangan melawan penjajah. Baru setelah tercapai bersama-sama menciptakan kemerdekaan Indonesia.

Rumusan Bung Karno selanjutnya menegaskan bahwa perlu adanya kerangka bersama itu adalah sikap cinta tanah air yang tidak berfikiran sempit, juga bukan *chauvinistik*, melainkan nasionalis yang sejati yang timbul dari rasa cinta akan manusia dan kemanusiaan. Baginya, rasa cinta bangsa itu adalah lebar dan luas, dengan memberi tempat kepada aliran-aliran lain, sebagai lebar dan

¹⁷Hartanto, *Skripsi Sejarah Pertentangan*, 64-65.

b. Sosialisme Menurut Bung Hatta

Bung Hatta memberikan pemahaman mengenai sosialisme yang berkaca dari kehidupan di desa yang berupa gotong royong dan azas kekeluargaan yang merupakan kesinambungan dari kolektivisme yang beraturan. Pada intinya Bung Hatta menginginkan tidak adanya pemimpin yang besar yang tidak terkontrol untuk melaksanakan segala keinginannya, sebaliknya ia menginginkan azas kekeluargaan yang dan mufakat untuk tidak mencari permusuhan tetapi menggali kebenaran bersama.¹⁹

Sosialisme yang dianut Bung Hatta tidak lepas juga dari pengaruh Barat, karena Ia memang menempuh studinya di Belanda sehingga sedikit banyak terpengaruh. Ia banyak menimba ilmu dari Fabian Society (Inggris) yang merupakan laboratorium yang mengolah masalah-masalah kemasyarakatan. Salah satu pengaruh

¹⁸Ibid., 66.

¹⁹*Ibid.*, 71.

Sosialisme yang dicita-citakan oleh Bung Hatta tidak mengenal kelas, strata dan yang lainnya, tetapi lebih mengedepankan persamaan hak dan kewajiban dalam mendapatkan dan memberikan perhatian bagi kelompoknya. Berlaku juga rasa saling memiliki untuk sama rasa sama rata dengan tidak mempertentangkan kelas sosial dan yang lainnya.²²

²²*Ibid.*, 73.

melaksanakan suatu proyek yang dibayar sebagian dari hasil yang di peroleh melalui proyek tersebut. Tapi kepemilikan dan kepemimpinan harus tetap ditangan pihak Indonesia.²⁹

menghidupkan sosialisme dengan memberikan dorongan guna terintisnya jalan kesosialisme. Dengan tidak meninggalkan citacita dan berkemauan menjadi pelopor dan pembimbingnya.³²

Keberadaan BPS dirasa sangat perlu dan mendesak karena dapat mengetahui data statistik mengenai kekurangan dan kelebihan pada tiap-tiap bidang dan dapat mendeteksi bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk untuk dapat mengetahui kebutuhan dan perencanaan program pembangunan yang teratur.³³

Dalam konsep ekonomi sosialisme yang dianut Hatta, pemenuhan kebutuhan primer seperti air, listrik, gas atau bahan bakar lainnya sudah tercukupi dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam pengertian yang sebenarnya sosialisme tidak harus semuanya sama tapi disesuaikan dengan kemampuan individu dalam pemenuhan kebutuhan. Dalam pemenuhan kebutuhan perumahan juga tidak bisa dilepaskan peran dari badan-badan perwakilan rakyat untuk mengawasi dan mengontrol penyediaan rumah yang berimbang.³⁴

Sosialisme ekonomi menurut Bung Hatta dalam kegiatan ekonomi diserahkan pada swasta, negara, dan koperasi atau campuran antara swasta dan pemerintah dengan pengawasan negara tentunya. Menurutnya swasta sama sekali tidak mendapat tempat sentral, tidak

³² Sigit Yuliawan, *Skripsi Pemikiran Mohammad Hatta Dalam Pembangunan Sistem Perekonomian Di Indonesia Tahun 1921-1956* (Jember: Universitas Jember, 2008), 16.

³³ Ibid., 16.

³⁴ Ibid., 17.

menentukan serta ada semacam larangan swasta dalam memegang monopoli.³⁵

Bung Hatta memfokuskan semata-mata bagi masalah distribusi sebab badan-badan perantara banyak tingkatnya antara produksi dan konsumsi yang akan memahalkan harga. Jika dilihat secara konkrit yang paling pokok bagi ekonomi sosialis adalah soal pengangkutan dan perhubungan, terutama di darat dan di laut. Disebut dengan istilah pengangkutan sosialis yang berfungsi untuk memenuhi keperluan rakyat. Dengan demikian prioritas kehidupan ekonomi sosialis adalah pemenuhan kebutuhan primer seperti papan, sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan.³⁶

4. Revolusi

a. Revolusi Menurut Bung Karno

Soekarno mendasarkan segala tindakannya itu atas pendapat, bahwa revolusi Indonesia untuk melaksanakan Indonesia yang adil dan makmur belum selesai. Sebelum tercapainya Indonesia yang adil dan makmur, revolusi masih berjalan terus dan segala susunan yang ada itu bersifat sementara. Ia katanya tidak menentang demokrasi, malahan menuju demokrasi yang sebenarnya yaitu demokrasi gotong royong seperti yang terdapat dalam masyarakat Indonesia yang asli.³⁷

³⁵Ibid., 17.

³⁶ Ibid., 18.

³⁷ Hatta, *Demokrasi Kita*, 5.

Soekarno membuat Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis) dan Resopim (Revolusi, Sosialisme Indonesia, Pimpinan Nasionalisme), yang mana revolusi yang seperti ini akan terwujud demokratis yang ke Indonesiaan. Revolusi yang dikendalikan oleh satu pemimpin nasional yaitu PBR (Pemimpin Besar Revolusi), sesuai dengan itu maka seluruh pejabat termasuk Pemimpin Lembaga-Lembaga Tinggi dan Tertinggi Negara menurut UUD 45 diberi pangkat Menteri, sehingga kedudukannya di bawah presiden.³⁸

Dalam buku tulisan Moh. Hatta berjudul *Demokrasi Kita*, ditulisnya bahwa,

“...kalau di negeri-negeri yang sudah lama menjalankan demokrasi masih terdapat perbuatan menyalahgunakan kekuasaan, apalagi dalam negeri yang masih muda seperti Indonesia. Bagi beberapa golongan menjadi partai pemerintahan berarti “membagi rejeki”. Golongan sendiri dikemukakan, masyarakat dilupakan. Seorang menteri mendapatkan tugas dari partainya untuk melakukan tindakan-tindakan yang memberi keuntungan bagi partainya. Seorang menteri perekonomian misalnya menjalankan tugasnya itu dengan memberi lisensi dengan bayaran yang tertentu untuk kas partainya atau dalam pembagian lisensi itu yang separtai dengan dia didahulukannya. Keperluan uang untuk biaya pemilihan umum menjadi sebab kecurangan itu....”⁴²

Partai yang seharusnya dipilih untuk mengatur pemerintahan, negara, dan rakyat, tetapi malah disalah gunakan untuk kepentingan pribadi. Suasana politik semacam ini memberikan kesempatan kepada berbagai jenis petualang politik dan ekonomi serta manusia profesi maju kemuka. Segala pergerakan dan semboyan nasional diperalatkan mereka, partai-partai politik

⁴¹Ibid., 474.

⁴²Hatta, *Demokrasi Kita*, 13.

penyerahan kedaulatan, bukan saja tidak setia dan sependapat dengannya, malah berselisih pendapat.⁴⁵

Akhirnya pada 1 Desember 1956, Moh.Hatta resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Dengan kondisi seperti ini bukan maksud Moh. Hatta melarikan diri. Malah dari sini ia mulai berani melakukan tindakan-tindakan yang mengkritik Soekarno dan aparat pemerintahan yang kian lama semakin bobrok.

C. Pengunduran Diri Moh Hatta

Proses pengunduran Moh. Hatta dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI sangatlah alot. Banyak sekali pertimbangan para anggota DPR yang belum meluluskan surat pengundurannya.

Pada tanggal 20 Juli 1956, Moh. Hatta meletakkan jabatannya sebagai wakil presiden secara resmi, tetapi tidak ada tanggapan. Pada tanggal 23 November 1956, Moh. Hatta menulis surat susulan tentang suratnya yang pertama. Isinya tetap bahwa tanggal 1 Desember 1956, dia akan berhenti sebagai wakil presiden.⁴⁶

Pengunduran diri Moh. Hatta bukan tanpa alasan, ia sudah memikirkan untuk kedepannya. Yang terpenting baginya dia tidak ikut dalam permainan politik dalam pemerintah yang sudah keluar dari kata-kata demokrasi. Apalagi Soekarno yang sudah berlainan jalan dengannya. Beberapa faktor pengunduran diri Moh. Hatta sebagai wakil presiden sebagai berikut:

⁴⁵Alfarizi, *Mohammad Hatta*, 184

1. Terjadinya ketimpangan/ penyelewengan kekuasaan di dalam aparatur pemerintahan, korupsi merajalela, permainan politik yang menguntungkan bagi partainya sendiri, dan hal-hal ini tidak bisa dihindarkan. Moh. Hatta tidak bisa berbuat apa-apa, hanya menegur dan mengingatkan mereka. Ia juga menulis kepada kawannya, Jacobs: “Soal korupsi inilah tempo hari salah satu sebab yang penting, apa sebab saya mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden.”⁴⁷

Karena, sambungnya, ia tidak bisa bertindak apa-apa oleh kedudukan konstitusionalnya.

2. Terpilihnya anggota DPR dan Konstituante yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu 1955. Sesuai dengan isi surat Moh. Hatta tanggal 20 Juli 1956, atas pengunduran dirinya sebagai wakil presiden. Katanya:

“..... setelah DPR yang dipilih rakyat mulai bekerja dan Konstituante menurut pilihan rakyat sudah tersusun, sudah tiba waktunya bagi saya untuk mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden.

Segara, sesudah Konstituante dilantik, saya akan meletakkan jabatan itu secara resmi.

Saat itu saya pilih, karena sesuai dengan penerimaan saya dahulu waktu itu diminta menjadi Wakil Presiden kembali, yang menurut dugaan saya di waktu itu jabatan sementara ini tidak akan lebih lama dari setahun dua tahun.”⁴⁸

3. Retaknya Dwitunggal yang digadang-gadang sebagai aktor pemersatu bangsa Indonesia, kini hanya sebagai ucapan yang hanya melintas saja. Retaknya Dwitunggal menjadi Dwitanggal, dikarenakan Moh. Hatta merasa Soekarno sudah bersebrangan jalan dengannya. Meski di awal pertemuan mereka sudah terjadi perselisihan pendapat, tetapi kemudian

⁴⁷ Surat Hatta kepada Jacobs 20 November 1961. Lihat, Deliar Noer, *Mohammad Hatta Biografi politik* (Jakarta: LP3ES, 1990).

⁴⁸Noer, *Moh. Hatta*, 481-482.

Pada tanggal 28 November, DPR bersidang khusus membicarakan
minta berhentinya wakil presiden. Sebelumnya, sebuah Panitia
Permasyarakatan telah dibentuk untuk mempermudah rembugan tentang
masalah ini. Hadir dalam sidang 28 November tersebut 145 anggota dan
sidang hanya berlangsung selama dua menit saja.⁵⁰ Ketua DPR Sartono
SH bertanya kepada panitia tentang laporan sudah belumnya dibuat
tentang pertemuan mereka dengan Wakil Presiden Mohammad Hatta.
Panitia belum siap dalam laporan.⁵¹

Sidang dilanjutkan pada hari berikutnya tanggal 29 November 1956. Kali ini hadir 200 anggota dan sidang cuma berlangsung selama tujuh menit saja.⁵² Panitia melaporkan kepada ketua DPK bahwa

⁴⁹Sudah di jelaskan di atas di awal bab III, yang mana pertentangan mereka nampak dari ideologi dan kepribadian yang berlawanan. Aspek demokrasi, sosialisme, dan ekonomi menjadi faktor utama perbedaan pemikiran mereka dalam membangun Indonesia antara tahun 1956-1965. Ketegangan di antara mereka berdua sangat menarik, lontaran-lontaran kritikan-kritikan pedas saling mereka tontonkan di majalah atau surat kabar khususnya Moh. Hatta yang selalu mengkritik kepemimpinan Soekarno. Lihat, Deliar Noer, *Mohammad Hatta Biografi politik* (Jakarta: LP3ES, 1990).

⁵⁰Sidang hanya berjalan dua menit, dikarenakan ketidaksiapan anggota DPR yang baru terbentuk akan masalah ini. Dalam suatu pemerintahan negara seharusnya terdapat presiden dan wakil presiden sebagai *icon*, tetapi dengan mendadakanya wakil presiden yang mengudurkan diri, bingung siapa yang akan menggantikannya. Lihat, Salman Alfarizi, *Mohammad Hatta Biografi Singkat 1902-1980* (Jogjakarta: Grasi House of Book, 2013).

⁵¹Noer, *Moh. Hatta*, 184.

⁵²Masih belum bisa memutuskan/ meluluskan pengunduran diri Moh. Hatta, karena Presiden Soekarno belum tahu hal ini. Lihat, Salman Alfarizi, *Mohammad Hatta Biografi Singkat 1902-1980* (Jogjakarta: Grasi House of Book, 2013).

dianggap perlu untuk bertemu dengan Presiden Soekarno untuk membicarakan hal ini.⁵³

Kemudian, keesokan hari tanggal 30 November 1956. Sidang ketiga tentang acara setuju tidaknya parlemen bila Wakil Presiden Mohammad Hatta meletakkan jabatan dilangsungkan malam harinya, melanjutkan sidang akan keputusan tersebut. Jumlah anggota yang hadir bertambah dan disemarakkan pula oleh 14 orang menteri yang turut hadir.⁵⁴

Panitia memberikan laporan, serta pandangan umum beberapa anggota dilontarkan dan dengan musyawarah dan mufakat, DPR akhirnya meluluskan permintaan Moh. Hatta yang mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.

D. Dwitunggal Manjadi Dwitanggal

Pada tanggal 9 Juli 1942, malam hari diadakan perundingan antara Soekarno, Hatta, dan Sjahrir mengenai siasat perjuangan kemerdekaan, serta cara untuk menghadapi tentara Jepang. Mereka bersepakat Soekarno-Hatta akan bekerja sama dengan Jepang, sedangkan Sjahrir bergerak di bawah tanah. Sejak pertemuan itu, terjalin kerjasama Dwitunggal Soekarno-Hatta. Sambil berjabat tangan keduanya berjanji, “inilah janji kita sebagai dwitunggal, inilah sumpah kita yang jantan untuk bekerja berdampingan dan tidak akan terpecah hingga negeri ini mencapai kemerdekaan.”⁵⁵

⁵³Noer, *Moh. Hatta*, 184-184.

⁵⁴Ibid., 185.

⁵⁵Alfarizi, *Mohammad Hatta*, 171.

Sebaliknya, Soekarno adalah orang yang emosional, mudah dipengaruhi keadaan. Kata-kata dan ide baginya adalah alat untuk menggerakkan semangat, yang dipergunakannya untuk menjalankan aksi massa menentang kapitalisme dan imperialisme.

Dua tokoh ini memang berbeda. Pada tahun 1930-an Soekarno berkomentar tentang Hatta: “Ah, susah orangnya. Kami tak pernah sependapat mengenai sesuatu persoalan. Hatta dan aku tak pernah berada dalam gerakan gelombang yang sama.”⁵⁶

Kemudian, Hatta menulis artikel di *Daolat Ra'jat* tanggal 30 November 1933 berjudul “Tragedi Soekarno”, karena pada 31 Juli 1933 Soekarno ditangkap untuk kedua kalinya oleh pemerintah Hindia Belanda

[illegible]

Pada tanggal 17 Agustus 1945 bersama-sama memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia. Selama revolusi kemerdekaan, Dwitunggal Soekarno-Hatta telah tumbuh menjadi mitos yang identik dengan perjuangan kemerdekaan serta persatuan Indonesia. Namun, mitos tersebut seakan sirna setelah PKI masuk dalam percaturan politik pemerintahan.

“ketika saya melepaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan menggantikannya dengan Undang-Undang Dasar 1950, arti dan kedudukan Dwitunggal mulai berubah dan menurun. PKI mengambil keuntungan dari situasi ini dalam strategi dan perjuangan politiknya, mempercepat proses penurunan dalam kemampuan mempersatukan dan manfaat Dwitunggal. Sering terjadi salah paham anantara kami berdu, terutama saat partai-partai politik mulai saling bertarung, berusaha saling

[illegible]

menjatuhkan PKI berhasil mengubah Dwitunggal menjadi Dwitunggal.”⁵⁸

Pada tahun 1955, tanpa konsultasi dengan Hatta. Soekarno menandatangani pemecatan Sosrodanukusumo oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo 1. Moh. Hatta mengharapkan peninjauan kembali, karena prosedur pemecatan tidak sesuai dilakukan dengan wajar. Hatta menghubungkannya dengan perikemanusiaan dari Pancasila. Kepada Soekarno yang tidak membicarakannya lebih dahulu soal ini dengan Hatta, dia berkata: “Kalau saudara memandang Dwitunggal yang begitu banyak dibicarakan di waktu yang akhir ini lebih dari show saja, sebenarnya dalam hal-hal yang mengenai dasar-dasar negara, saudara sepatutnya berembuk dengan saya lebih dahulu, sebelum mengambil tindakan.”⁵⁹

Masalah pemecatan pegawai tinggi, walau mengenai seseorang, bagi Hatta sudah mengenai dasar negara, karena seperti yang telah kita lihat masalah ini menyangkut sendi negara dan pemerintahan. Oleh sebab itu Hatta sangat menyesali Soekarno yang tanpa memeriksa menandatangani pemecatan Sosrodanukusumo. Banyak sekali hal-hal yang menjadi faktor retaknya Dwitunggal, diantaranya;⁶⁰

1. Presiden Soekarno memberikan grasi kepada Djody Gondokusumo, Menteri Kehakiman pada Kabinet Ali Sastroamidjojo I, yang dijatuhi hukuman 1 tahun penjara, karena penyelewengannya pada masa ia menjadi Menteri.

⁵⁸Mohammad Hatta, *Bung Hatta Menjawab* (Jakarta: Gunung Agung, tanpa tahun), 157.

⁵⁹Surat Hatta kepada Soekarno 25 Maret 1955. Lihat, Deliar Noer, *Mohammad Hatta Biografi politik* (Jakarta: LP3ES, 1990).

⁶⁰Noer, *Moh. Hatta*, 475-476.

2. Presiden Soekarno memasukkan PKI dalam Kabinet.
3. Presiden tidak mau menandatangani RUU pembatalan perjanjian KMB yang telah disetujui oleh DPR pada tahun 1956. Desakan Hatta sebagai wakil presiden agar Presiden Soekarno menandatangani RUU tersebut tidak dipedulikan.
4. Seringnya Presiden melancong ke luar negeri dengan alasan kegiatan negara, padahal tidak demikian.
5. Presiden juga mencampuri urusan kabinet, yang seharusnya tidak sepatutnya Soekarno ikut campur masalah kabinet. Umpamanya, ia menuntut agar ia disetujui untuk membakar semangat rakyat dalam menghadapi soal Irian tahun 1950-1951. Tuntutan yang terpaksa secara tegas ditolak oleh Perdana Menteri Natsir. Akhirnya tanpa diketahui kabinet terjadi peristiwa 17 Oktober 1952, presiden pun turut dalam kampanye pemilihan umum jauh sebelum kampanye dimulai. Ia yang tidak berpartai dan tidak merupakan calon dalam pemilihan umum, berpidato di Amuntai, Kalimantan selatan dan pada tahun 1953 agar rakyat menolak gagasan negara Islam.
6. Terbentuknya Demokrasi Terpimpin oleh Soekarno 1959-1966, yang lebih mengarah kepada kediktatoran. Para pejabat negara banyak yang melakukan korupsi, ekonomi negara menurun, rakyat kelaparan, banyak sekali terjadi ketimpangan sosial, hingga masalah pemberontakan PKI.

Hal-hal yang seperti menyebabkan Hatta kecewa besar dan merasa berat untuk turut memikul tanggung jawabnya, karena ia tidak pula bisa

Dwitunggal bagai satu badan. Namun, dengan semua kejadian ini nyata Dwitunggal menjadi Dwitanggal, apalagi setelah Moh. Hatta mengundurkan diri dari kursi wakil Presiden dan memilih mengabdikan diri dengan rakyat sambil mengintip jendela perpolitikan pemerintahan dengan lebih berperan di luar rana pemerintahan.